

BAB V

KESIMPULAN

Pada bagian ini, penulis dapat menarik beberapa kesimpulan dari pembahasan pada bab sebelumnya antara lain :

1. Dalam proses verifikasi piutang dalam kepailitan PT IBG, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan (KPPP MB) dinyatakan sebagai kreditor konkuren oleh kurator terkait dengan utang pajak PT IBG. Untuk itu, KPPP MB melakukan upaya renvoi prosedur ke Pengadilan Niaga atas status kreditor konkuren terhadap tagihan utang pajak PT IBG dari tahun 1998 sampai 2008 berdasarkan surat pemberitahuan Nomor: S458/WPJ.01/KP.0404/2013 tertanggal 31 Oktober 2014. Permohonan renvoi tersebut dinyatakan tidak diterima oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga dengan alasan hukum yaitu keberatan yang diajukan oleh KPPP MB adalah keliru karena dilakukan terhadap Daftar Pembagian Tetap tahap kedua (DPT II) yang merupakan daftar pembagian sekaligus penutup kepailitan PT IBG. KPPP MB seharusnya mengajukan renvoi atas Daftar Pembagian Sementara (DPS) dan terfokus hanya pada bantahan terhadap daftar tagihan yang diakui/dibantah.
2. Upaya hukum yang dapat ditempuh dalam Penyelesaian Utang Pajak Bagi Perusahaan Pailit yaitu diselesaikan dengan renvoi prosedur ke Pengadilan Niaga selanjutnya upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak kreditor yang keberatan terhadap daftar piutang dan kurator

setelah adanya Putusan Majelis Hakim Pengadilan Niaga adalah permohonan kasasi namun apabila setelah Majelis Hakim Mahkamah Agung memutus perkara kepailitan dalam tingkat Kasasi, apabila salah satu atau para pihak tetap merasa keberatan maka dimungkinkan untuk pihak yang merasa keberatan tersebut melakukan upaya hukum terakhir yang disebut dengan peninjauan kembali. Permohonan peninjauan kembali dapat diajukan apabila ditemukan bukti baru dan apabila dalam putusan yang bersangkutan terdapat kekeliruan hakim dalam menerapkan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ahmad Yani & Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Kepailitan*, PT. Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2002
- Adrian Sutedi, *Hukum Kepailitan*, cet.1, Ghalia Indonesia, Bogor, 2009
- Aria Sujudi, *Kepailitan di Negeri Pailit*, Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia, Jakarta, 2004
- Imran Nating, *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005
- Jono, *Hukum Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010
- Kartono, *Kepailitan dan Pengunduran Pembayaran*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1985
- Lilik Mulyadi, *Perkara Kepailitan dan PKPU Teori dan Praktik*, Alumni, Bandung, 2010
- M. Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, Kencana, Jakarta, 2008
- Mardiasmo, *Perpajakan*, Edisi Terbaru 2016, CV. Andi Offset, Yogyakarta, 2016
- Munir Fuady, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010
- Siahaan, Marihot, *Utang Pajak, Pemenuhan Kewajiban dan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004
- Rachmadi Usman, *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*, cet.1, GramediaPustaka Utama, Jakarta, 2004
- Rahayu Hartini, *Hukum Kepailitan*, UMM Press, Malang, 2012
- Rochmat Soemitro, *Asas dan Perpajakan I*, Rafika Aditama, Jakarta, 1998
- Santoso, Brotodihardjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Rafika Aditama, Bandung, 2003
- Sari Pudiyatmoko, *Pengantar Hukum Pajak*, Penerbit Andi, Yogyakarta., 2006

Sentosa Sembiring, *Hukum Kepailitan dan Peraturan Perundang-Undangan Terkait dengan Kepailitan*, CV. Nuansa Aulia, Bandung, 2006

Sumyar, *Dasar-dasar Hukum Pajak dan Perpajakan, cet. 1*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 2004

Sutan Remy Sjahdeni, *Hak Tanggungan, Asas-Asas, Ketentuan-Ketentuan Pokok dan Masalah yang Dihadapi oleh Perbankan*, Alumni, Bandung, 1999

Sutan Remy Sjahdeini, *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2009

Tony, Marsyahrul, *Pengantar Perpajakan*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2005

Zainal Asikin, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001

B. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

C. Sumber lainnya

Amrozi, <http://lawyers.forumotion.net/t216-ask-renvoi-proses-pada-pengadilan-niaga-> diakses pada minggu, 7 Januari 2018 pukul 19:15 WIB